



LAPORAN **AKUNTABILITAS KINERJA** **INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GRAFIK	6
BAB I.....	7
A. LATAR BELAKANG.....	7
1. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN.....	8
2. Maksud Dan Tujuan Laporan	9
B. KEDUDUKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI	9
1. Kedudukan dan Tugas Pokok	9
2. Fungsi	10
3. Susunan Organisasi	10
4. Gambaran Umum Kondisi Organisasi	12
BAB II.....	20
A. RENCANA STRATEGIS.....	20
1. VISI	20
2. MISI.....	21
3. TUJUAN DAN SASARAN	22
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024.....	25
BAB III.....	34
A. AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	81
BAB IV	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar	11
Gambar 2. Alat-alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18
Gambar 3. Alat Uji Material pada Laboratorium UPTD <i>Workshop</i>	19
Gambar 4. Pembangunan Jalan Mapilli Barat-Luyo	36
Gambar 5. Peningkatan Jalan Ruas Galeso -Mampie	40
Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Sabura - Tapua	42
Gambar 7. Normalisasi/ Restorasi Sungai kec. Anreapi	48
Gambar 8. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I Alapahang Desa Riso	49
Gambar 9. Peningkatan Bendung Irigasi Rattenallu	51
Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Belakang SD 23 Kelurahan Darma	60
Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Beroangin Kec. Mapilli	63
Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lapas Polewali	68
Gambar 13. Dokumentasi Pembangunan Panggung Alun-Alun Polewali	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi Kepegawaian	13
Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan	13
Tabel 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin.....	15
Tabel 4. Data Kondisi Alat Berat	16
Tabel 5. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Polewali Mandar TA. 2024	26
Tabel 6. Program dan Anggaran Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024	26
Tabel 7. Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Polewali Mandar TA. 2023	27
Tabel 8. Panjang Jalan kabupaten Yang Terbangun	35
Tabel 9. Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten yang terbangun Tahun 2021, 2022 dan 2023	36
Tabel 10. Panjang Jalan Kabupaten Yang Direhabilitasi.....	38
Tabel 11. Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten yang Direhabilitasi Tahun 2021, 2022 dan 2023.....	40
Tabel 12. Pemeliharaan Rutin Jalan	41
Tabel 13. Kegiatan Pembangunan/Penggantian Jembatan	41
Tabel 14. Perbandingan Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2021, 2022 dan 2023	42
Tabel 15. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan	43
Tabel 16. Sub Kegiatan Normalisasi /Restorasi Sungai	48
Tabel 17. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.....	49
Tabel 18. Perbandingan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2021, 2022 dan 2023	50
Tabel 19. Kegiatan Peningkatan Bendung Irigasi	51
Tabel 20. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	52
Tabel 21. Persentase Drainase Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik	57
Tabel 22. Perbandingan Kegiatan Persentase Drainase Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik Tahun 2021, 2022 dan 2023	58

Tabel 23. Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan	59
Tabel 24. Perbandingan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Tahun 2021, 2022 dan 2023.....	60
Tabel 25. Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	62
Tabel 26. Perbandingan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2021, 2022 dan 2023	64
Tabel 27. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	66
Tabel 28. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021, 2022 dan 2023	67
Tabel 29. Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.....	71
Tabel 30. Perbandingan Jumlah Unit Bangunan Gedung Daerah yang Terbangun Tahun 2021, 2022 dan 2023	72
Tabel 31. Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	73
Tabel 32. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciptakarya.....	73
Tabel 33. Program Penyelenggaraan Jalan	81
Tabel 34. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).....	82
Tabel 35. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.....	83
Tabel 36. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	84
Tabel 37. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.....	84
Tabel 38. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	85
Tabel 39. Program Penataan Bangunan Gedung	85
Tabel 40. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	86
Tabel 41. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.....	87
Tabel 42. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	87

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	14
Grafik 2. Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin.....	15
Grafik 3. Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten Yang Terbangun Tahun 2021, 2022 dan 2023.....	37
Grafik 4. Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten yang Direhabilitasi Tahun 2021, 2022 dan 2023.....	40
Grafik 5. Perbandingan Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2021, 2022 dan 2023	43
Grafik 6. Perbandingan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2021, 2022 dan 2023	50
Grafik 7. Grafik Perbandingan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase yang terbangun Tahun 2021, 2022 dan 2023	58
Grafik 8. Grafik Perbandingan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Tahun 2021 2022 dan 2023.....	61
Grafik 9. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2021, 2022 dan 2023	64
Grafik 10. Perbandingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Tahun 2021, 2022 dan 2023.....	67
Grafik 11. Perbandingan Jumlah Unit Bangunan Gedung Daerah yang Terbangun dalam Kondisi Baik Tahun 2020, 2021 dan 2022	72

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar menyusun Laporan Kinerja/LAKIP tahun 2023. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (Parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Polewali Mandar dan sumber anggaran APBN tahun anggaran 2023.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Polewali Mandar, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023.

Metode penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Dalam pengukuran kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023 ini menggambarkan indikator kinerja output utama (grand output) atau outcome pada program/kegiatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2023 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023.

1. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN

Pedoman dan aturan-aturan yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, meliputi:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

- Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten polewali Mandar
- Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja;
- Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar ;
- Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 ;

2. Maksud Dan Tujuan Laporan

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, serta mempunyai tujuan yaitu sebagai wujud pertanggungjawaban OPD dan untuk mengetahui kemampuan OPD dalam pencapaian tujuan organisasi.

B. KEDUDUKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan dan Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar sebagai dinas daerah, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam
Pokok bidang pekerjaan umum yang menjadi tanggung
jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan
pemerintah.

2. Fungsi

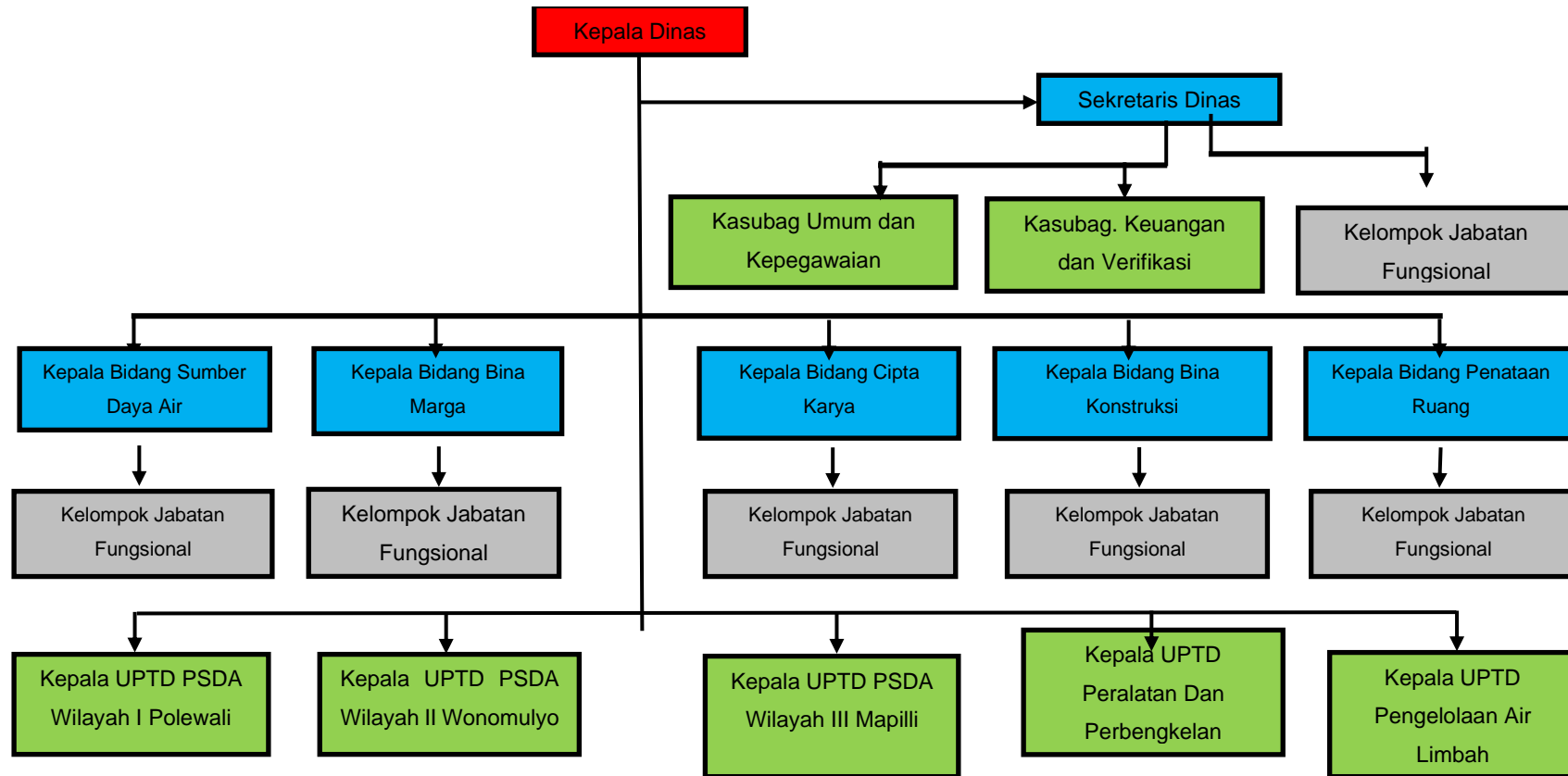
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten dibidang pekerjaan umum meliputi Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta karya
- b. Penyusunan rencana dan program dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang meliputi sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina konstruksi;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang meliputi sumber daya air, bina marga dan cipta karya, penataan ruang dan bina konstruksi;
- d. Pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang meliputi sumber daya air, bina marga dan cipta karya, penataan ruang dan bina konstruksi;
- e. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar, terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Penataan Ruang, UPTD, Jabatan Fungsional secara lengkap Struktur Organisasi sebagai berikut. :

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar



4. Gambaran Umum Kondisi Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Susunan Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
 - Kasubag Keuangan dan Verifikasi
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Sumber Daya Air (SDA)
- d. Bidang Bina Marga
- e. Bidang Cipta Karya
- f. Bidang Bina Konstruksi
- g. Bidang Penataan Ruang
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 - UPTD PSDA Wilayah I Polewali & Kasubag Tata Usaha
 - UPTD PSDA Wilayah II Wonomulyo & Kasubag Tata Usaha
 - UPTD PSDA Wilayah III Mapilli & Kasubag Tata Usaha
 - UPTD UPTD Peralatan Dan Perbengkelan & Kasubag Tata Usaha
 - UPTD UPTD Pengelolaan Air Limbah & Kasubag Tata Usaha
- i. Fungsional

➤ **Kondisi Kepegawaian**

Rasio perimbangan antara formasi dan *bezetting* sampai akhir tahun 2021 belum terpenuhi sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel 1. Kondisi Kepegawaian

No.	Uraian	Eselon	Formasi	Bezetting	(%)
1	Kepala Dinas	II-B	1	1	100
2	Sekretaris Dinas	III-A	1	1	100
3	Kepala Bidang	III-B	5	5	100
4	Kasubag	IV-A	2	2	100
5	Kepala UPTD	IV-A	5	5	100
6	Kasubag Tata Usaha UPTD	IV-B	5	4	80
7	Fungsional		16	12	75
8	Staff / Tenaga Lapangan		100	92	92
9	Pegawai Non ASN		265	253	95,47
	Jumlah	-	400	375	93,75

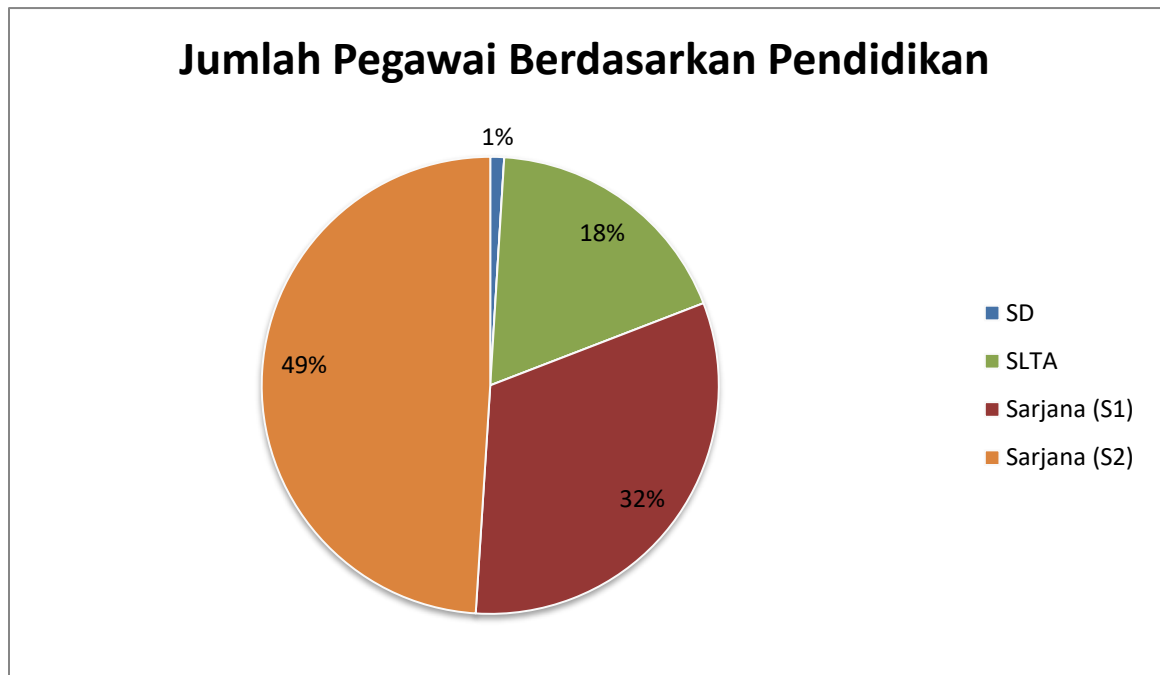
Berdasarkan tabel diatas, terlihat untuk formasinya terisi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan kecuali Eselon IV-B formasinya lowong 1 pada Kasubag Tata Usaha UPTD PSDA Wilayah II. Begitu pun untuk formasi fungsional staf dan pegawai non ASN.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Persentase
SD	2	0	1,57
SLTA	27	0	29,14
S1-DIV	45	23	51,11
S2-S3	14	11	78,57
Jumlah	88	34	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang paling dominan untuk instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah lulusan Sarjana (S1), sebanyak 68 orang atau sebesar 53,55% dari jumlah pegawai dan yang paling sedikit adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 orang atau sebesar 01,57%.

Grafik 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

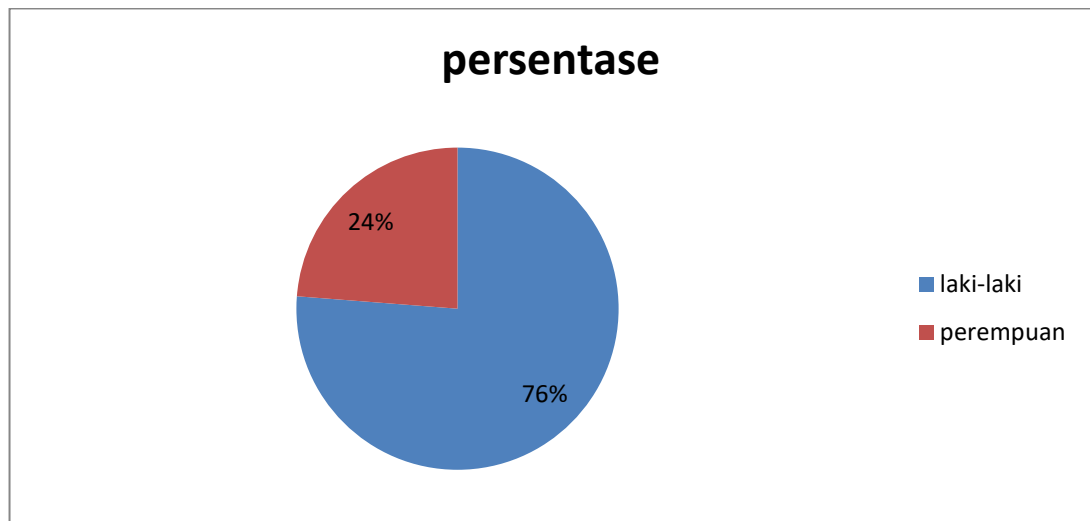


Rendahnya pemahaman dalam bidang teknis dan masih banyaknya pegawai dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum memahami teknologi bidang informatika ke PU-an mengakibatkan pekerjaan pelaporan dan pengolahan data masih belum dapat dikerjakan secara maksimal.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	93	76,22
2	Perempuan	29	23,77
	Jumlah	122	100

Grafik 2. Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Grafik 1.2 tersebut jumlah pegawai yang ada di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didominasi oleh laki-laki sebesar 76,22%, hal tersebut adalah wajar dikarenakan banyaknya kegiatan fisik di lapangan yang membutuhkan stamina yang prima.

Sedangkan perempuan sebesar 23,77% merupakan pendukung dalam kelancaran proses kegiatan tersebut

➤ **Kondisi Sarana Dan Prasarana Penunjang**

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendukung dan menunjang pencapaian target kinerja antara lain :

- a. UPTD Workshop dilengkapi dengan alat - alat berat. Alat berat sangat menunjang pelaksanaan kegiatan di lapangan. Ada total 16 unit alat berat yang tersedia di *workshop*, antara lain :

Tabel 4. Data Kondisi Alat Berat

No	Jenis Alat	Merk	Kondisi Alat			Status Kepemilikan	Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1.	EXC LONG ARM SUMITOMO	SH 210	Baik	-	-	Dinas pupr	Dioperasikan
2	Exc Long Arm Sumitomo	SH 210	-	Rusak		Dinas PUPR	Stand By UPTD
3	Exc Caterpillar	320	-	Rusak		Dinas PUPR	Stand By UPTD
4	Greder Komatsu	GD 31 RC-3A	-	Rusak		Dinas PUPR	Stand By UPTD
5	Greder Komatsu	GD 511 A	Baik	-	-	Dinas PUPR	Dioperasikan
6	Bomag/Walas	BW-211 D-40	Baik	-	-	Dinas PUPR	Stand By UPTD
7	Mini Bomag/ Baby Walas		baik	-	-	Dinas PUPR	Stand By UPTD

*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Polewali Mandar*

8	Back Loader Probesco	Case 580 Sm- 2		Rusak		Dinas PUPR	Stand By UPTD
9	Bulk Doser Hitachi	DX 75M		Rusak		Dinas PUPR	Stand By UPTD
10	Truk Toronton 10 Roda	Mitsubis hi Fuso DC 9032	Baik			Dinas PUPR	Stand By UPTD
11	Dump Truck 6 Roda	Dyna 130 HT DC 8003	Baik			Dinas PUPR	Stand By UPTD
12	Dump Truck 6 Roda	Dyna 130 HT DC 8004		Rusak		Dinas PUPR	Stand By UPTD
13	Dump Truck 6 Roda	Dyna 130 HT DC 8002 biru		Rusak		Dinas PUPR	Stand By UPTD
14	Dump Truck 6 Roda	Dyna 130 HT		Rusak		Dinas PUPR	Stand By UPTD
15	Dump Truck 6 Roda	Dyna 130 HT		Rusak		Dinas PUPR	Stand By UPTD
16	Dump Truck 6 Roda	Dyna 130 HT		Rusak		Dinas PUPR	Stand By UPTD

17	Mesin Las	Danyo		Rusak		Dinas PUPR	Stand By UPTD
18	Stamplir			Rusak		Dinas PUPR	Stand By UPTD

Gambar 2. Alat-alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



b. Laboratorium, berfungsi untuk menguji dan menganalisa bahan material bahan bangunan dan lainnya sebelum digunakan di lapangan ataupun setelah proses pembangunan terlaksana. Ada beberapa alat yang masih dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur antara lain :

- Alat uji beton
- Theodolite
- Thermometer aspal
- Alat sondir
- Alat ukur ketebalan aspal

Gambar 3. Alat Uji Material pada Laboratorium UPTD *Workshop*



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan tujuan Kabupaten Polewali Mandar yaitu **“Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”**.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 dirancang guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

1. VISI

Visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah **“Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”**. Untuk merealisasikan visi tersebut diperlukan upaya strategik yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal tersebut diperlukan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dicapai dengan baik. Melalui misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019 – 2024 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius

- 2) Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis ekonomi potensi unggul wilayah
- 3) Mengembangkan infrastuktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
- 4) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern.

2. MISI

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi dan mengetahui perannya masing masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi/kabupaten.

Didalam merealisasikan Visi dan Misi tersebut telah disusun program-program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2019 – 2024. Terkait misi tersebut diatas yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yaitu pada misi ke tiga dan ke empat.

- **Mengembangkan Infrastuktur Berkualitas Dan Terintegrasi Serta Berwawasan Lingkungan.**
- **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Modern.**

Program dan kegiatan harus mampu memenuhi capaian tujuan. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi

Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih akuntabel dan Modern

Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar sebagai instansi teknis yang menangani pembangunan fisik di Kabupaten Polewali Mandar, untuk mewujudkan suatu infrastruktur yang berkualitas yang mampu menjadi faktor pendorong dan menarik (*pull and push factor*) dalam mendukung pembangunan dan pergerakan perekonomian dimasa mendatang, dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi lokal (*local economic development*) yang ada dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk itu di dalam perencanaan dan pembangunan suatu infrastruktur, maka prinsip efisien, efektif, ekonomis, optimal dengan asas pemberdayaan masyarakat melalui jalur penjangkaran aspirasi masyarakat (*bottom up - top down*) senantiasa dikembangkan dan diterapkan dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan–pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang di fomalisasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Setelah menentukan tujuan strategis, maka selanjutnya tentu harus dirumuskan sasaran strategis yang ingin dicapai sebagai wujud dari proses perencanaan strategis. Tujuan utama dalam penentuan sasaran adalah bagaimana mawujudkan suatu infrastruktur yang berkualitas, yang mampu

memberikan nilai tambah dalam pemanfaatannya dengan menggunakan sumber daya pembiayaan dan sumber daya organisasi secara efisien, efektif dan berhasil guna.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar adalah :

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

Program : Penyelenggaraan Jalan

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air

Program : Penegelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman

Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

: Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah kabupaten/Kota

- : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- : Program Penataan Bangunan Gedung
 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
- : Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Jasa Kontruksi

- Program : Pengembangan Jasa Konstruksi
- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

- Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 6 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Polewali Mandar tahun 2024. Dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2024 tersebut diuraikan sasaran-sasaran, indikator kinerja, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran, pada Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan penjabaran dari sasaran dan indikator sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Polewali Mandar TA. 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan	Indeks Infrastruktur Kebinamargaan	59,98%
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	14,43%
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciptakarya	Indeks Infrastruktur Keciptakarya	57,86%
4	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	Indeks Kepuasan Layanan Jasa Konstruksi	21,74 BAIK
5	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai	60,00%
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A
		Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat daerah	100%
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Sangat Baik

Tabel 6. Program dan Anggaran Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 2.656.964.000	APBN/ APBD
2	Penyelenggaraan Jalan	Rp. 15.223.847.400	APBN/APBD
3	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 402.705.070	APBD
4	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 15.428.817.999	APBN/APBD

*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Polewali Mandar*

5	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 11.468.230.536	APBN/APBD
6	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 500.102.880	APBD
7	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp. 3.389.127.326	APBD
8	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 205.376.279	APBD
9	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 331.102.324	APBD
10	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.217.069.922	APBD

Tabel 7. Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Polewali Mandar TA. 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM	0,15	0,19
		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	0,4	0,98
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	2	2
		Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Bendung	2	2

*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Polewali Mandar*

		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	3.654	3658
		Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung	2	2
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	12,3	12,3
		Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendung	43	43
		Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Unit	3	3
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/ Jembatan	Dok	2	2
		Panjang Jalan yang Dibangun	KM	3	3
		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	17	17
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	3	3
		Panjang Jembatan yang Dibangun	M	18	35
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	18	28
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciptakarya	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	1940	1730
		Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	RT	300	0
		Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	RT	500	848

*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Polewali Mandar*

		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	RT	500	848
		Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	3	1
		Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Meter	500	1562
		Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Meter	6000	6000
		Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dok	1	1
		Jumlah Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah kab/kota yang dilakukan Rehabilitasi, renovasi, ubah suai	Unit	6	6
		Jumlah penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	3	3
4	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Orang	80	80

*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Polewali Mandar*

		Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Dok	4	4
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Orang	30	30
5	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dok	1	1
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dok	2	2
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	1	1
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	3	3
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Dok	1	1
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1	1
		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	129	129
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	laporan	1	1

*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Polewali Mandar*

	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelegkapannya	Paket	126	0
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	0
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2
	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	2	2
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	4	4
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang yang disediakan	Dok	2	2
	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Material	2	2
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	99	99
	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	14	14

	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan	Unit	4	4
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	2
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	laporan	12	12
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	58	58
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	24

Melihat tabel di atas realisasi indikator sub kegiatan ada yang mencapai target bahkan ada yang melampaui dari target, dan ada Sub Kegiatan yang tidak Mencapai Target, bahkan ada Sub Kegiatan yang tidak Terealisasi

➤ Indikator Sub Kegiatan Yang Tidak Mencapai Target adalah:

- 1) Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat.
- 2) Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara

- Indikator sub kegiatan yang melampaui dari target adalah:
 - 1) Panjang Bangunan Perkuatan Tebing
 - 2) Panjang Jaringan Irigasi yan Direhab
 - 3) Panjang Jembatan yan dibangun
 - 4) Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi
 - 5) Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota
 - 6) Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik
 - 7) Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan

Adapun Indikator yang melampau dari target disebabkan karna pada saat adanya perubahan, operator lupa mengganti target yang telah ditentukan dan disepakati.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hokum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan organisasi kepada pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Program/Kegiatan dimasa yang akan datang.

TUJUAN MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR

a. MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR KEBINAMARGAAN

1) Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap

Salah satu faktor keberhasilan pemerintah kabupaten Polewali Mandar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya adalah dengan melalui penyediaan fasilitas atau infrastruktur yang memadai diantaranya adalah menyediakan akses jalan dan jembatan sebagai mobilitas masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 64.867.596.161,- Anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp.30.236.246.161,- dan Anggaran APBN Rp.34.631.350.000,-realisasi anggaran sebesar Rp.45,433.754.666, sekitar- 70,04%.

a) Panjang Jalan Kabupaten Yang Terbangun

Kegiatan Pembangunan Jalan sasaran utamanya adalah meningkatkan *aksesibilitas* dan *interkoneksi* antar wilayah, dengan meningkatkan kondisi jaringan jalan dari jalan tanah menjadi jalan sudah diperkeras, serta membuka kawasan terisolasi dengan melakukan perintisan jalan menuju kawasan potensial untuk dikembangkan. Pada kegiatan Pembangunan Jalan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.933.714.350,- Anggaran APBD dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.775.865.950,- 95,99%.

Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menargetkan Pembangunan Jalan Kabupaten 3 Km yang terealisasi sepanjang 3,011 KM,. Adapun kegiatan Pembangunan Jalan dan adalah :

Tabel 8. Panjang Jalan kabupaten Yang Terbangun

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Pembangunan Jalan Mapilli Barat-Luyo	597,512 M	896.268.000	DAU
2	Peningkatan Ruas Jalan Matakali Tabone	1 paket	200.000.000	DAU

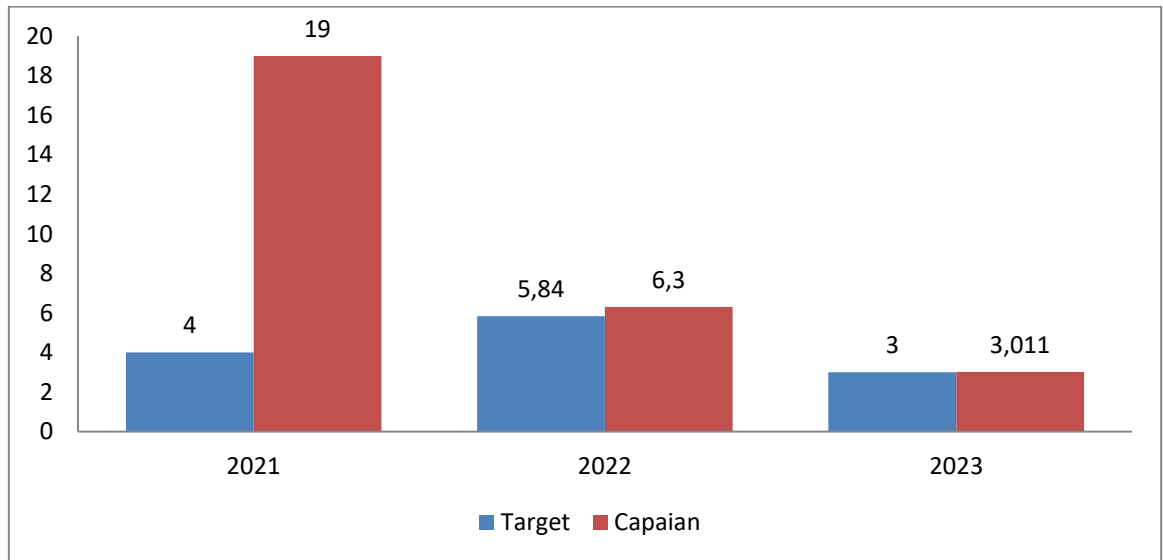
Gambar 4. Pembangunan Jalan Mapilli Barat-Luyo



Tabel 9. Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten yang terbangun Tahun 2021, 2022 dan 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Panjang jalan kabupaten yang terbangun	4 Km	19 Km	5,84 Km	6,3 Km	3 Km	3,01 Km

Grafik 3. Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten Yang Terbangun Tahun 2021, 2022 dan 2023



Grafik diatas menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan jalan Terealisasi Sesuai Target.

b) Panjang Jalan Kabupaten Yang Direhabilitasi

Pada kegiatan Rehabilitasi Jalan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 56.734.793.711,- Anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp 25.103.443.711,- dan anggaran APBN sebesar Rp 34.631.350.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.38.175.057.425,- 67,29%.

Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menargetkan Panjang Jalan Kabupaten yang di Rehabilitasi 17 Km yang terealisasi sepanjang 31,084 Km,. Adapun kegiatan Rehabilitasi Jalan sebagai berikut:

Tabel 10. Panjang Jalan Kabupaten Yang Direhabilitasi

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Lamasarian - Napo	3,40 Km	2.336.499.825	DAK
2	Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Lambepada - Lamasarian	2,09 Km	2.336.499.825	DAK
3	Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Napo TodangTodang	5,80 Km	8.237.502.200	DAK
4	Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Talolo - Lemosusu	1,12 Km	2.240.000.000	DAK
5	Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Salurihan - Teppong	3,05 Km	4.459.646.438	DAK
6	Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin,	10,680 Km	12.592.061.760	DAK

*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Polewali Mandar*

	Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Sila-sila - Sattoko			
7	Peningkatan Jalan Ruas Lapeo-Beru baru	1 Paket	Rp 2.499.110.000	DAU
8	Pembangunan Jalan Ruas Palungan - Tappingan	240.228 Meter	480.456.000	DAU
9	Peningkatan Jalan Ruas gulung tulu lambanang	298.824666666667 Meter	448.237.000	DAU
10	Peningkatan Jalan Ruas Parappe-katumbangan	1395.09 Meter	2.092.635.000	DAU
11	Rehabilitasi jalan matakali- seppong	348.678 Meter	523.017.000	DAU
12	Pengaspalan Jalan Paket I	1497.6055 Meter	2.995.211.000	DAU
13	Peningkatan Jalan Kompleks Perumahan Polewali Residen	397.8185 Meter	795.637.000	DAU
14	Peningkatan jalan ruas Galeso Mampie	697.4115 Meter	1.394.823.000	DAU
15	Pembangunan Jalan Ruas Ponorogo-Arjosari	231.411351351351 Meter	428.111.000	DAU
16	Penigkatan Jalan Cappego- banatorejo	270.282702702703 Meter	500.023.000	DAU
17	Peningkatan jalan Ruas Sarampu-Tonyaman	0 348.8915 Meter	697.783.000	DAU
18	Peningkatan jalan Ruas Bulu Lenggo	747.7975 Meter	1.495.595.000	DAU

Gambar 5. Peningkatan Jalan Ruas Galeso -Mampie



Progres 0% (MC 0)

Progres 100%

Tabel 11. Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten yang Direhabilitasi Tahun 2021, 2022 dan 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi	4 Km	19 Km	8,02 Km	8,07 Km	17 Km	31,084 Km

Grafik 4. Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten yang Direhabilitasi Tahun 2021, 2022 dan 2023



Grafik diatas menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi jalan mencapai target.

➤ **Pemeliharaan Rutin Jalan**

Ditahun 2023 sub kegiatan pemeliharaan rutin jalan terdapat dua indikator yaitu, jumlah ruas jalan yang di pelihara dan jumlah alat berat yang dipelihara dengan target 7 unit alat berat yang dipelihara namun karena keterbatasan anggaran hanya 4 unit saja yang dapat dipelihara tahun ini dengan pagu anggran sebesar Rp. 760.091.400,-.

Tabel 12. Pemeliharaan Rutin Jalan

No	U r a i a n	Volume	Anggaran
1	Belanja Pemeliharaan Rutin Jalan	1,5 Paket	675.000.000

c) Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik

Jembatan merupakan akses penghubung yang menghubungkan wilayah yang terpisahkan oleh aliran sungai sehingga *interkoneksitas* antar wilayah dan kawasan akan semakin lancar yang pada akhirnya akan memperlancar perputaran roda perekonomian masyarakat. Pada tahun 2023 ditargetkan Pembangunan 18 meter dan terealisasi 40 Meter.

Tabel 13. Kegiatan Pembangunan/Penggantian Jembatan

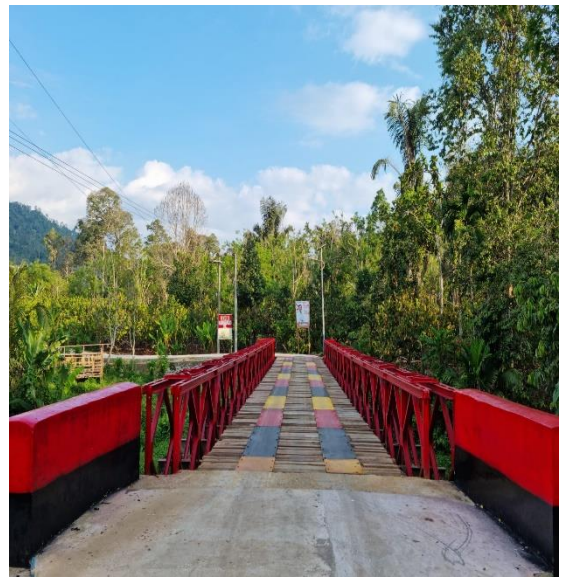
No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Pembangunan Jembatan Desa Sambalibali	1 Paket	271.779.000	DAU
2	Pembangunan Jembatan Desa Tenggelang	2 Paket	500.000.000	DBH Sawit
3	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Kunyi	1 Paket	200.000.000	DAU
4	Pembangunan Jembatan Sungai Sanrego Paket I	1 Paket	271.779.000	DAU

5	Pembangunan Jembatan Sungai Sanrego Paket II	1 Paket	358.491.250	DAU
6	Penggantian Jembatan Dsn Pallis Desa Batupanga	1 paket	4.996.700	DAU
7	Penggantian Jembatan Ruas Jalan Matakali - Pelitakan	1 paket	22.487.850	dau

Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Sabura - Tapua



Progres 0% (MC 0)

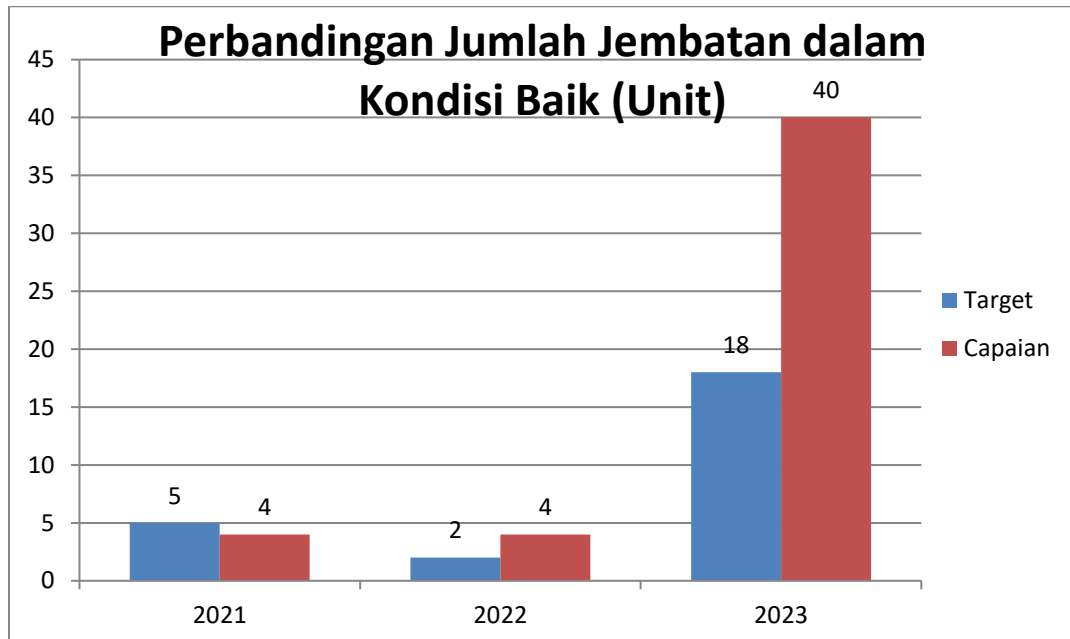


Progres 100%

Tabel 14. Perbandingan Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2021, 2022 dan 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Jumlah jembatan dalam kondisi baik	5	4	2	4	18	40

Grafik 5. Perbandingan Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2021, 2022 dan 2023



Grafik diatas menunjukkan bahwa target Jembatan dalam kondisi baik di tahun 2023 melampaui target.

Tabel 15. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Analisa Capaian Indikator Kinerja	Penjelasan Gagal/Berhasil
Program Penyelenggaraan Jalan - Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	75,16%	59,21%	78,77%	Realisasi Indikator Program (59,21%) lebih kecil dari target (75,16). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (78,77%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Tidak Berhasil”. Dana yang disediakan tidak cukup untuk mencapai target

*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Polewali Mandar*

<p>- Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik</p> <p>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</p>	80,38%	59,46%	73,97%	<p>Realisasi Indikator Program (59,46%) lebih kecil dari target (80,38%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (73,97%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Tidak Berhasil”. Dana yang disediakan tidak cukup untuk mencapai target</p>
<p>- Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap, Sedang, Baik</p>	75,16%	59,21%	78,77%	<p>Realisasi Indikator kegiatan (59,21%) lebih kecil dari target (75,16%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (78,77%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Tidak Berhasil”. Dana yang disediakan tidak cukup untuk mencapai target</p>
<p>- Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik</p>	80.38%	59,46 %	73,97%	<p>Realisasi Indikator kegiatan (59,46%) lebih kecil dari target (80,38%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (73,97%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Tidak Berhasil”. Dana yang disediakan tidak cukup untuk mencapai target</p>

*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Polewali Mandar*

<p>Sub Kegiatan Pembangunan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan kabupaten yang terbangun 	3 Km	3 Km	100%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (3 Km) sesuai dengan target (3 Km). Analish Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Berhasil
<p>Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jalan kabupaten yang rehabilitasi 	17 Km	17 Km	100%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (17 km) sesuai dengan target (17 km). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Berhasil”.
<p>Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Alat Berat yang dipelihara 	4 Unit	4 Unit	100%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (4 Unit) sesuai dengan target (4 Unit). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja % masuk pada kategori “ Berhasil”.
<p>Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Jembatan Kabupaten yang Terbangun 	18 M	35 M	194,4%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (18 M) lebih besar dari target (35 M). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (194,4%). Indikator Kinerja % masuk pada kategori “Sangat Berhasil”.
<p>Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/ Jembatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan 	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (2 Dok) sesuai dengan Target (2 Dok) Analisa Capaian Kinerja (100%) masuk pada Kategori Baerhasil

- Permasalahan antara lain :
 - Perlunya peningkatan kualitas jalan pada beberapa titik.
 - Tingkat kerusakan jalan lebih besar dibandingkan perbaikan/pemeliharaan jalan
 - Data dasar kondisi infrastruktur jalan belum akurat
 - Anggaran pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan jalan terbatas
 - Pembebasan lahan untuk pembangunan/perintisan jalan masih terkendala

- Solusi yang dapat di tempuh agar beberapa permasalahan tersebut dapat diatasi antara lain :
 - Penanganan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan peningkatan kapasitas/ kualitas jalan dan pembangunan/ penggantian jalan sesuai dengan prioritas dan anggaran yang tersedia
 - Update data/ inventarisasi kondisi jalan
 - Penambahan anggaran dalam penanganan infrastruktur jalan dan jembatan
 - Berkoordinasi dengan instansi/ pihak yang terkait dengan pembebasan lahan.

b. MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Penyediaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk memelihara sumber-sumber air, jaringan irigasi, pembangunan/ pemeliharaan turap/talud/bronjong dan mengurangi kerusakan-kerusakan. Untuk mencapai indikator sasaran ini maka program yang dirancang yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan ada dua kegiatan pada program ini yakni :

- Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota,

mengalokasikan anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp. -. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.213.838.150,- atau 58,87%.

- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 6.571.466.380, . Anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp. 3.049.965.380 ,- dan Anggaran APBN Rp.3.521.501.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.130.535.257,- 89,06%.

1) Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi jaringan irigasi teknis dan semi teknis yang ada agar dapat berfungsi secara maksimal dalam menyuplay kebutuhan air akan tanaman sehingga pola tanam dapat diatur dengan baik dan tanaman dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan produksi yang lebih baik.

Di tahun 2023 Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di targetkan 78,57%, dengan ralisasi sebesar 11,84%. Jumlah DI (Daerah Irigasi) yang tersedia sebanyak 41 Daerah Irigasi dengan panjang saluran irigasi yang direhab pada tahun 2023 340 meter yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar.

a) Panjang Sungai Yang DiNormalisasi/Direstorasi

Sub Kegiatan Normalisasi /Restorasi Sungai, output kegiatan ini Panjang Sungai Yang Dinormalisasi/Restorasi dengan menargetkan 0,4 km namun dengan keterbatasan anggaran realisasi tidak mencapai hanya sebesar 0,98 km. Adapun kegiatan Normalisasi /Restorasi Sungai antara lain:

Tabel 16. Sub Kegiatan Normalisasi /Restorasi Sungai

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Normalisasi Saluran Pembuang Mate Kec. Campalagian	705.882352 941176 Meter	120.000.000	DAU
2	Normalisasi Saluran Pembuang Katumbangan – Buku Kec. Campalagian	1170 Meter	198.900.000	DAU
3	Normalisasi Sungai Desa Mirring	850 Meter	144.500.000	DAU
4	Normalisasi Sungai Desa Panyampa kec. Campalagian	49 Meter	120.246.000	DAU
5	Perkuatan Tebing Sungai Bulubawang Desa Patampanua Kec. Matakali	0,1 Paket	25.575.000	DAU

Gambar 7. Normalisasi/ Restorasi Sungai



Progres 0% (MC 0)



Progres 100%

b) Panjang Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi

Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, output kegiatan ini Panjang Saluran Irigasi Yang Telah Direhabilitasi dengan menargetkan 3654 KM namun dengan keterbatasan anggaran realisasi tidak mencapai hanya sebesar 3.658 Km. Adapun kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan antara lain:

Tabel 17. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Besoangin	1 Paket	665.950.000	DAU
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Galung-galung	1 Paket	836.099.000	DAU
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mammi	1 Paket	616.167.000	DAU
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mangopi	1 Paket	591.972.000	DAU
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tibung	1 Paket	711.313.000	DAU

Gambar 8. REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. TIBUNG



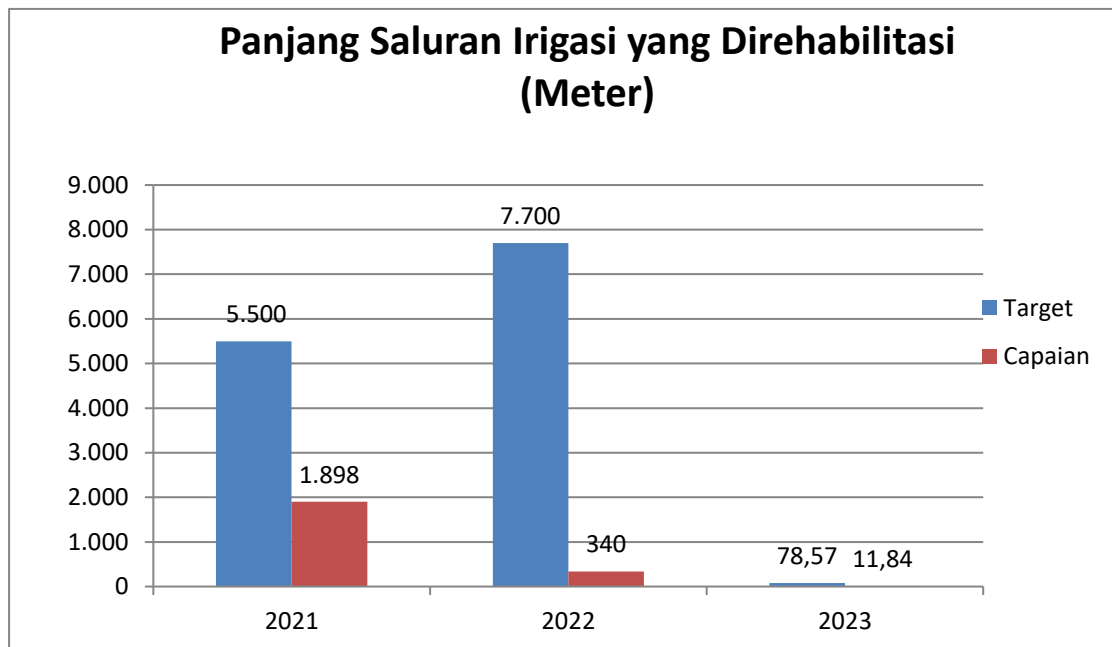
Progres 0%

Progres 100%

Tabel 18. Perbandingan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2021, 2022 dan 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan Irigasi	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	5.500 meter	1.898 meter	7.700 meter	340 meter	78,57	11,84

Grafik 6. Perbandingan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2021, 2022 dan 2023



c) Jumlah Bendung Yang Telah Ditingkatkan

Sub kegiatan Peningkatan Bendung Irigasi ini fokus pada Pembangunan/pemeliharaan bendung irigasi. Adapun kegiatan Peningkatan Bendung Irigasi adalah :

Tabel 19. Kegiatan Peningkatan Bendung Irigasi

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Peningkatan Bendung DI. Pappasaran	1 paket	Rp 50,000,000	DAU

Gambar 9. Peningkatan Bendung DI Pappasaran



Progres 0%

Progres 100%

➤ Permasalahan antara lain :

- Rendahnya anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan / pemeliharaan jaringan irigasi
- Tingkat kerusakan pada jaringan irigasi lebih besar dibandingkan perbaikan/pemeliharaan, di sebabkan beberapa faktor seperti bencana longsor
- Tingginya target pada awal penyusunan Renja
- Lemahnya pengawasan terhadap penegakan perda irigasi

➤ Solusi yang dapat di tempuh agar permasalahan tersebut dapat diatasi antara lain :

- Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk membiayai pemeliharaan jaringan irigasi.

- Pada saat pengurangan anggaran kegiatan seharusnya penentuan target di turunkan juga
- Meningkatkan frekuensi pengawasan terhadap penegakan perda pengairan dan polisi pengairan

Tabel 20. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Analisa Capaian Indikator Kinerja	Penjelasan Gagal/Berhasil
<p>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</p> <p>- Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik</p>	78,57%	11,84%	15,06%	<p>Realisasi Indikator Program (11,84%) lebih kecil dari target (78,57%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (15,06%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Tidak Berhasil”. Dana yang disediakan tidak cukup untuk mencapai target</p>
<p>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>- Panjang Sungai yang Terpelihara</p>	2,53Km	0,585 km	23,12%	<p>Realisasi Indikator Kegiatan (0,585km) lebih kecil dari target (2,53km). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (23,12%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Tidak Berhasil”. Dana yang disediakan tidak cukup untuk mencapai target</p>

<p>Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai</p> <p>- Panjang Sungai Yang Dinormalisasi/direstrisasi</p>	0.4km	0,98km	245%	<p>Realisasi Indikator Sub Kegiatan (0,98km) lebih besar dari target (0,4km). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (245%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"..</p>
<p>Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing</p> <p>- Panjang bangunan perkuatan Tebing yang dibangun</p>	0,15km	0,19 km	126,6%	<p>Realisasi Indikator Sub Kegiatan (0,19km) lebih besar dari Target (0,15km) analisa capaian indicator Kinera (126,6%) indicator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"</p>
<p>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>- Persentase Pintu Air Irigasi Dalam Kondisi Baik</p>	84,94%	0,70%	0,824%	<p>Realisasi Indikator Program (0,70%) lebih kecil dari target (84,94%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (0,824%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil".</p>
<p>Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan</p>				<p>alisasi Indikator Sub Kegiatan (2 km) sama besar dari target (2 km). Analisa Capaian</p>

- Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	2 km	2 km	100%	Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Berhasil".
Sub Kegiatan Peningkatan Bendung Irigasi	2 Bendung	2 bendung	100%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (2 Bendung) sama dengan target (2 bendung). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
- Jumlah Bendung yang ditingkatkan				
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				
- Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	3654 km	3658 km	100,1	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (3658km) hamper sama dengan Target *3658km) Analisa Capaian Indikator (100,1%) indicator Kinerja Masuk pada Kategori "berhasil"
Sub Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi	2 Bendung	2 Bendung	100%	Realisasi Indikator sub kegiatan (2 bendung) sama dengan Target (2 Bendung) Analisa Capaian Indikator (100%) indicator kinerja masuk pada Kategori "berhasil"
- Jumlah Bendung Irigasi yang direhabilitasi				
Sub Kegiatan				

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	12.3 km	12.3km	100%	Realisasi Indikator sub kegiatan (12,3km) sama dengan Target (12.3km) Analisa Capaian Indikator (100%) indicator kinerja masuk pada Kategori "berhasil"
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	43	43	100%	Realisasi Indikator sub kegiatan (43 Bendung) sama dengan Target(43 bendung Analisa Capaian Indikator (100%) indicator kinerja masuk pada Kategori "berhasil"
- Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendung	Bendung		
Sub Kegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi				
- Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	3 unit	3 unit	100%	Realisasi Indikator sub kegiatan (3 unit) sama dengan Target (3 Unit) Analisa Capaian Indikator (100%) indicator kinerja masuk pada Kategori "berhasil"

**c. MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR
KECIPTAKARYAAN**

Salah satu faktor dalam peningkatan kualitas permukiman di Kabupaten Polewali Mandar adalah penyediaan fasilitas air bersih, pembangunan sanitasi, saluran drainase serta pembangunan jalan lingkungan. Masih banyaknya warga masyarakat yang belum menikmati fasilitas air bersih serta untuk mendukung program *Sustainable Development Goal (SDGs)* yaitu pada tahun ini diharapkan mengurangi

jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat. Hal tersebut sangat penting dan mendasar sehingga program dan kegiatan untuk peningkatan kualitas permukiman setiap tahun dianggarkan. Ada beberapa OPD yang terlibat dalam peningkatan kualitas permukiman ini yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1) Persentase Drainase Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase yang mendukung sasaran Meningkatnya kualitas drainase kawasan perkotaan, dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu Persentase Drainase Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik dengan realisasi sebesar 84,20%. Kegiatan yang mendukung pencapaian dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung sasaran Meningkatnya panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air, dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu Panjang Saluran drainase Perkotaan yang ditingkatkan dengan realisasi sebesar 312,4 km.

a) Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan

Salah satu faktor keberhasilan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya terutama masyarakat pedalaman adalah dengan melalui penyediaan fasilitas atau infrastruktur yang memadai diantaranya adalah menyediakan pembangunan drainase sebagai mobilitas masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran APBD Kabupaten

sebesar Rp.2.364.061.750-. Realisasi anggaran sebesar Rp 1.990.592.497 atau sekitar , - 84,20%.

Kegiatan Persentase Drainase Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik tahun ini terdapat 11 titik lokasi pada 4 kecamatan diantaranya adalah :

Tabel 21. Persentase Drainase Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Pembangunan Drainase Desa Barumbung	Meter	126.000.000	DAU
2	Pembangunan Drainase Belakang Sentral	1 Paket	187.877.000	DAU
3	Pembangunan Drainase Kelurahan Sidodadi	1 Paket	Rp177.398.000	Dau
4	Pembangunan/Pemeliharaan Saluran Drainase Kelurahan Lantora	1 Paket	Rp141.861.000	Dau
5	Pembangunan/Pemeliharaan Saluran Drainase Kelurahan Manding	1 Paket	Rp155.917.000	Dau
6	Pembangunan/Pemeliharaan Saluran Drainase Kelurahan Wattang	1 Paket	Rp199.774.000	Dau
7	Pembangunan Saluran Pembagi Samping Karya Foto	1 Paket	Rp171.166.000	Dau
8	Pemeliharaan Drainase Basseang	1 Paket	100.000.000	Dau
9	Pemeliharaan Drainase Madatte	1 Paket	100.000.000	Dau
10	Pemeliharaan Drainase Manding	1 Paket	100.000.000	Dau
11	Pemeliharaan Rutin Drainase	2 Paket	200.000.000	Dau

Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan Pemeliharaan/Pembangunan Saluran Drainase Kel. Lantora



Progres 0%

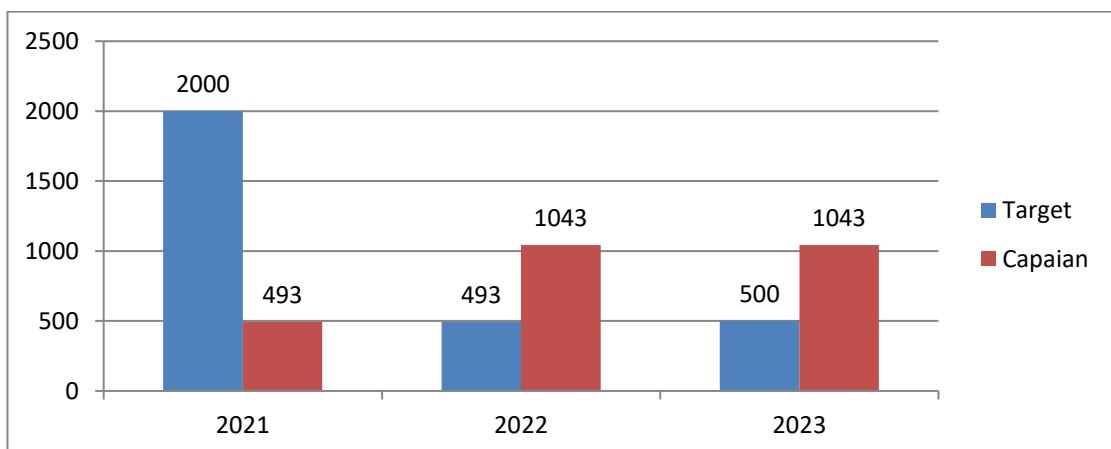
Progres 100%

Tabel 22. Perbandingan Kegiatan Persentase Drainase Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik Tahun 2021, 2022 dan 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciptakaryaannya	Panjang drainase yang terbangun	2000	493	493	1043	500	1562

Tabel diatas menunjukkan bahwa melampaui dari target.

Grafik 7. Grafik Perbandingan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase yang terbangun Tahun 2021, 2022 dan 2023



- Dalam pelaksanaannya kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong memiliki beberapa permasalahan antara lain :
 - Permasalahan sampah yang menyumbat aliran drainase
 - Pembuangan saluran air di bawah trotoar tidak berfungsi dengan baik.
- Dari permasalahan tersebut ada solusi yang dapat di tempuh agar permasalahan tersebut dapat diatasi antara lain :
 - Butuh kesadaran semua pihak untuk memelihara lingkungan khususnya drainase.
 - Perlu penanganan terhadap saluran pembuang di bawah trotoar.

2) Persentase Jalan Lingkungan Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik

a) Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Perkotaan Yang Ditingkatkan

Tahun 2022 Pembangunan Jalan Lingkungan terdapat di kecamatan Polewali dan kecamatan Campalagian. Pada kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp. 1.139.657.200,-Realisasi anggaran sebesar Rp. 890.269.000,-.78,12%. Adapun kegiatan untuk Pembangunan Jalan Lingkungan adalah :

Tabel 23. Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume Meter	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Sidodadi	Meter	p281.979.000	Dau
2	Pembangunan Rabat Beton Jalan Bhayangkara	100 Meter	Rp101.300.000	Dau

3	Pembangunan Rabat Beton Lingkungan Madatte		Rp100.000.000	Dau
4	Pembangunan jalan lingkungan Kelurahan Amassangan		Rp151.799.000	Dau
5	Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 2	375 m	Rp379.875.000	Dau

Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Amassangan

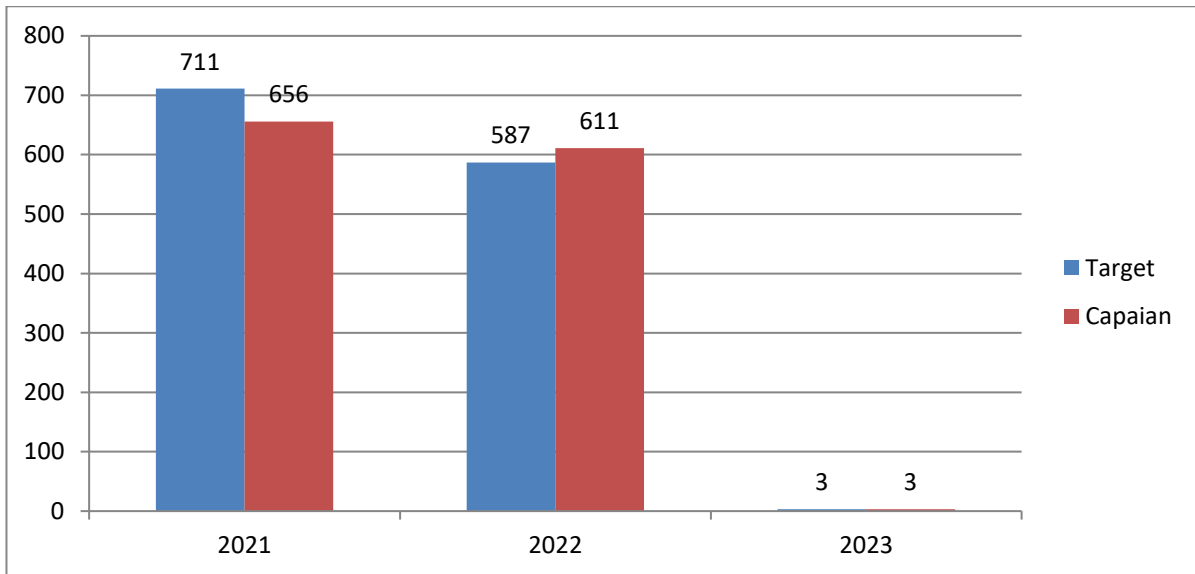


Tabel 24. Perbandingan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Tahun 2021, 2022 dan 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciptakarya	Panjang jalan lingkungan yang terbangun	711	655	587	611	3	3

Tabel diatas menunjukkan bahwa melampaui target.

Grafik 8. Grafik Perbandingan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Tahun 2021 2022 dan 2023



- Dalam pelaksanaannya kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan memiliki beberapa permasalahan antara lain :
 - Terkait pembebasan lahan yang belum jelas
 - Minimnya anggaran pembangunan Jalan Lingkungan.
- Dari permasalahan tersebut ada solusi yang dapat di tempuh agar permasalahan tersebut dapat diatasi antara lain :
 - Berkoordinasi dengan instansi/ pihak yang terkait dengan pembebasan lahan
 - Penyediaan anggaran untuk kegiatan pembangunan jalan lingkungan.

3) Persentase Pelayanan Akses Air Minum

a) Jumlah Penerima Manfaat Air Minum

Bidang Cipta Karya sebagai bidang yang bertanggung jawab dalam kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, di tahun 2023 pembangunan SPAM tersebar di 6 kecamatan. Pada kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.16.523.218.278,-. Anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp. 6.196.601.280,- dan Anggaran APBN

Rp.10.326.616.998,- realisasi anggaran sebesar Rp. 14.179.191.149,- 85,81%. Di tahun 2023 menargetkan Persentase Pelayanan Akses Air Minum sebesar 88,37% namun yang terealisasi sebesar 89,02 %. Adapun kegiatan untuk Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan adalah :

Tabel 25. Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Hibah Air Minum	1 Tahun	Rp1.950.000.000	DAU
2	Hibah Pamsimas	1 Tahun	Rp946.200.000	DAU
3	Pembangunan Sistem Penyedia Air Minum Leppo Desa Batupanga Daala Kec. Luyo	1 Paket	Rp190.000.000	Dau
4	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Skala Kec. Balanipa	1 Paket	Rp242.250.000	Dau
5	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Batulaya Kec. Tinambung	1 paket	Rp1.036.617.000	DAK
6	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Beroangin Kec. Mapilli	1 Paket	Rp1.100.000.000	DAK
7	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Besoangin Utara Kec. Tutar	1 Paket	Rp1.800.004.102	DAK

8	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lagi-agi Kec. Campalgian	1 Paket	Rp1.050.000.000	DAK
9	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pallis Kec. Balanipa	1 Paket	Rp1.150.000.000	DAK
10	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pandulangan Kec. Limboro	1 Paket	Rp1.200.000.000	DAK
11	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Taramanu Tua Kec. Tutar	1 Paket	Rp1.449.999.950	DAK
12	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tuttula Tua Kec. Tapango	1 paket	Rp1.036.617.000	DAK

Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Beroangin Kec. Mapilli



Progres 0%

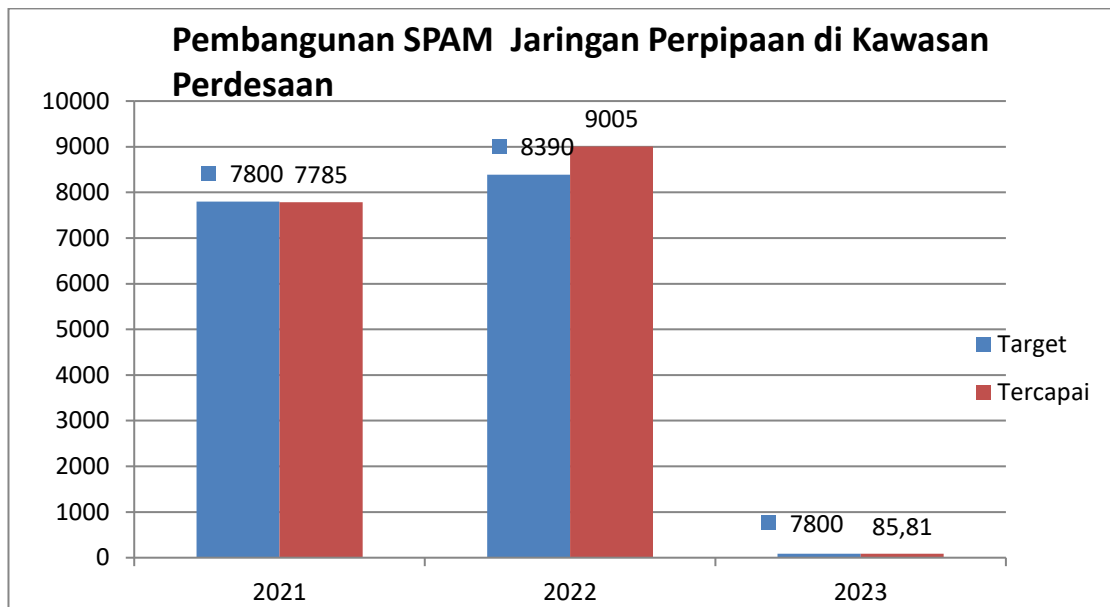


Progres 100%

Tabel 26. Perbandingan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2021, 2022 dan 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciaptakaryaan	Persentase Pelayanan Akses Air Minum	7800 jiwa	7785 jiwa	8390 jiwa	9005 jiwa	88,37 %	85,81

Grafik 9. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2021, 2022 dan 2023



Grafik diatas menunjukkan bahwa kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan melampaui dari target.

- Dalam pelaksanaannya kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Air Bersih) memiliki beberapa permasalahan antara lain :
 - Sulitnya mendapatkan sumber air baku yang akan memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat.
 - Lokasi sumber air baku pada sebagian wilayah berada jauh dari permukiman masyarakat sehingga membutuhkan material pipa

yang tidak sedikit, sehingga berpengaruh terhadap penyediaan anggaran

- Pemanfaatan asset belum maksimal disebabkan beberapa lokasi sudah terpasang jaringan pipa distribusi masyarakat namun belum terkoneksi dengan PDAM
- Dari permasalahan tersebut ada beberapa solusi yang dapat di tempuh agar beberapa permasalahan tersebut dapat diatasi antara lain :
 - Menyiapkan master plan sumber air baku jaringan pipa untuk kawasan perkotaan, wilayah perdesaan dan pesisir
 - Mengendalikan penebangan pohon atau meningkatkan penghijauan di sekitar sumber air baku.
 - Memaksimalkan peran serta masyarakat pemanfaat dalam pemeliharaan sumber air baku, pembangunan jaringan perpipaan agar biaya yang ditimbulkan dapat di tekan dan kualitas air bisa dipertahankan
 - Meningkatkan koordinasi antara PDAM dan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengenai penyerahan asset dan penyediaan air bersih.

4) Persentase Akses Sanitasi Layak

a) Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak

Ditahun 2023 ini Bidang Cipta Karya sebagai bidang yang bertanggung jawab dalam kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pada kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 10.524.670.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.377.764.450,- 96,01%. dengan menargetkan Persentase Akses sanitasi yang layak sebesar 100% namun yang teralisasi 96,01% tidak tercapainya target terbatasnya anggaran yang tersedia. Anggaran APBD sebesar Rp 4.331.602.900,- dan anggaran APBN sebesar Rp 6.193.068.000,- Adapun kegiatan

untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah :

**Tabel 27. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**

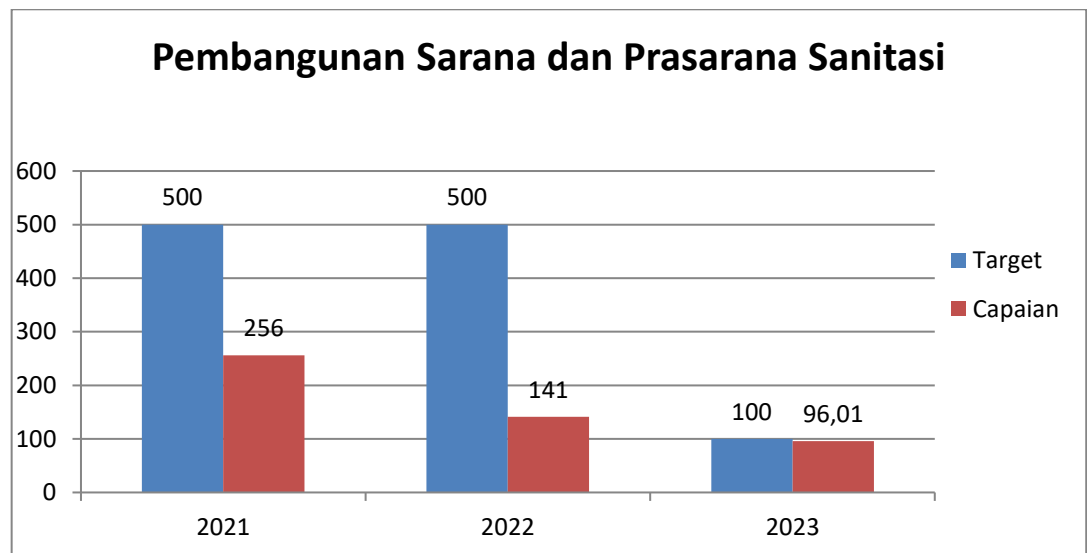
No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Pembangunan IPAL skala Pemukiman Kombinasi MCK Desa Beroangin Kec. Mapilli	1 paket	Rp570.000.000	DAK
2	Pembangunan IPAL skala Pemukiman Kombinasi MCK Desa Jambu Malea Kec. Tapango	1 Paket	Rp570.000.000	DAK
3	Pembangunan IPAL skala Pemukiman Kombinasi MCK Desa Katumbangan Kec. Campalgian	1 Paket	Rp570.000.000	DAK
4	Pembangunan IPAL skala Pemukiman Kombinasi MCK Desa Pasiang Kec. Matakali	1 Paket	Rp570.000.000	DAK
5	Pembangunan IPAL skala Pemukiman Kombinasi MCK Kel. Manding Kec. Polewali	1 Paket	Rp570.000.000	DAK
6	Pembangunan Tangki Septik Desa Bala Kec. Balanipa	1 Paket	Rp420.000.000	DAK
7	Pembangunan Tangki Septik Desa Laliko Kec. Campalgian	1 Paket	Rp420.000.000	DAK
8	Pembangunan Tangki Septik Kel. Takatidung Kec. Polewali	1 Paket	Rp420.000.000	DAK
9	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Desa Gattungan Kec. Campalgian	1 Paket	Rp350.000.000	DAK
10	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalgian	1 Paket	Rp350.000.000	DAK
11	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Desa Lenggo Kec. Bulu	1 Paket	Rp350.000.000	DAK
12	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Desa Tenggelang Kec. luyo	1 Paket	Rp350.000.000	DAK
13	Pembanguna Tangki Septik Desa Arjosari Kec. wonomulyo	1 Paket	Rp350.000.000	DAK
14	Pembangunan IPAL Komunal Lapas Kelas IIB Polewali Mandar Tahap 2	1 Paket	Rp140.000.000	DAU
15	Pembangunan Tangki Septik Hibah Air Limbah Setempat	1 Paket	Rp140.000.000	DAU

Tabel 28. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021, 2022 dan 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya akses sanitasi yang layak dan aman	Persentase Akses Sanitasi Layak	500	256	500	141	100	96,01

Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak tercapainya target disebabkan terbatasnya anggaran.

Grafik 10. Perbandingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Tahun 2021, 2022 dan 2023



Grafik diatas menunjukkan bahwa kegiatan tidak mencapai target disebabkan terbatasnya anggaran.

Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lapas Polewali



Progres 0%

Progres 100%

- Dalam pelaksanaannya kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki beberapa permasalahan antara lain :
- Terbatasnya lahan yang tersedia oleh masyarakat untuk lokasi pembangunan SPALD
 - Adanya tuntutan ganti rugi lahan masyarakat yang sudah tidak sesuai dengan Surat Pernyataan Hibah Lahan dan Surat Kesiapan Pengelolaan oleh Pemerintah Desa pada saat Sosialisasi Awal yang pernah dilakukan oleh Dinas PUPR bersama Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Tahap Penyusunan RKM maupun pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi di lapangan
 - Adanya kondisi jarak rumah penerima manfaat yang saling berjauhan menyebabkan dibutuhkan biaya pembangunan jaringan perpipaan yang lebih besar sehingga jumlah penerima yang dapat tersentuh oleh program harus menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia
 - Adanya perubahan volume pekerjaan dilapangan pada tahap konstruksi akibat dilakukannya revisi desain yang disebabkan

karena adanya perubahan kondisi lapangan seperti tersebut diatas yang secara teknis sudah tidak sesuai dengan dokumen RKM yang terdapat dalam Kontrak Kerja.

- Pada Tahap Pasca Konstruksi, Penyerahan (Serah Terima) Aset dan Pengelolaan Prasarana IPAL DAK yang telah terbangun oleh Dinas PUPR ke Pemerintah Desa dan/atau Pengelola IPAL (KSM) yang meliputi kewajiban melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan Surat Pernyataan Kesiapan Pengelola yang telah dibuat sebelumnya oleh Pemerintah Desa ke Dinas PUPR pada saat tahapan pengusulan program, ternyata tidak dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa dan/atau KSM sehingga layanan Sanitasi untuk masyarakat seringkali terhambat ketika terjadi penumpukan sedimen sampah pada jaringan pipa air limbah sehingga terjadi pemampatan/buntu dan menimbulkan bau tidak sedap di sekitarnya
 - Bangunan MCK Plus tidak dimanfaatkan secara optimal oleh warga karena disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara prasarana IPAL dan MCK yang telah terbangun dalam bentuk iuran pengguna sehingga menyulitkan bagi KSM dalam melaksanakan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan misalnya untuk pembelian Token Listrik untuk Pompa Air MCK, Sabun Cuci dan Alat-Alat Kebersihan untuk KM/WC dan Upah Tukang Pembersihnya
- Dari permasalahan tersebut ada beberapa solusi yang dapat di tempuh agar beberapa permasalahan tersebut dapat diatasi antara lain :
- Dinas PUPR dalam proses pengusulan anggaran di pusat selanjutnya, maka hanya akan mengusulkan desa calon penerima program SPALD yang benar-benar tersedia lahannya oleh masyarakat yang dibuktikan dengan Surat Hibah Lahan dan Pernyataan Komitmen dari Pemilik Lahan dan Pemerintah

Desa agar bertanggung jawab kepada Dinas PUPR jika terjadi permasalahan lahan ketika pekerjaan dalam masa konstruksi dan saat pasca konstruksi

- Dalam proses pemilihan lokasi rumah calon penerima manfaat, maka akan lebih diprioritaskan pada rumah-rumah yang terdapat pada lokasi kawasan kumuh dan padat penduduk sehingga jarak rumah penerima manfaat lebih pendek dan biaya pembangunan jaringan perpipaan yang dibutuhkan sesuai dengan dengan alokasi anggaran yang tersedia
- Dinas PUPR dan Pemerintah Desa harus berkoordinasi dengan baik agar di lapangan agar Adanya permintaan perubahan pelaksanaan pekerjaan dilapangan oleh masyarakat setempat yang sudah tidak sesuai dengan alokasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) agar dapat diminimalisir dan dikomunikasikan dengan baik oleh Pemerintah Desa kepada Masyarakatnya
- Dinas PUPR dalam proses pengusulan anggaran di pusat selanjutnya, maka hanya akan mengusulkan desa calon penerima program SPALD yang benar-benar mendapatkan dukungan Anggaran Operasi dan Pemeliharaan Prasarana SPALD yang bersumber dari BUMDES tanpa tergantung dengan besarnya partisipasi masyarakat dalam bentuk iuran wajib yang di Kelola oleh KSM sehingga prasarana yang terbangun dapat terus dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat

5) Persentase Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum Kondisi Baik

a) Jumlah Unit Bangunan Gedung Daerah yang Terbangun

Ditahun 2023 ini Bidang Cipta Karya sebagai bidang yang bertanggung jawab dalam Program Penataan Bangunan Gedung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.552.575.288

,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.530.773.655,- 71,79%. Jumlah Unit Bangunan Gedung Daerah yang Terbangun yang ditargetkan di bangun tahun 2023 ini sebanyak 6 unit terealisasi sesuai dengan target. Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum yang terbangun di tahun anggaran 2023 ini yaitu :

Tabel 29. Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Pembangunan Mes Kejaksaan Forkopimda	1 tahun	Rp948.110.000	DAU
2	Pembangunan RUMDIS SPN Polda Sulbar	1 Paket	Rp987.488.000	DAU
3	Pembebasan lahan kantor Camat Balanipa	1 Paket	Rp670.053.000	DAU
4	Rehabilitasi Kantor Sub Denpom Polman (lanjutan)	1 Paket	Rp192.205.064	DAU
5	Pembangunan Panggung Alun-alun	1 Paket	Rp198.888.430	DAU
6	Pembangunan Stadion Mini Tahap 1 Tinambung	1 Paket	Rp1.992.107.000	DAU
7	Pembangunan Sel / Ruang tahanan BNN	1 Paket	Rp199.907.000	DAU
8	Pembangunan Aula Terbuka DPUPR	1 Paket	Rp61.600.000	DAU
9	Pembangunan Asrama Jogja Putri Tahap 3	1 Paket	Rp795.750.000	DAU

Gambar 13. Dokumentasi Pembangunan Panggung Alun-Alun Polewali

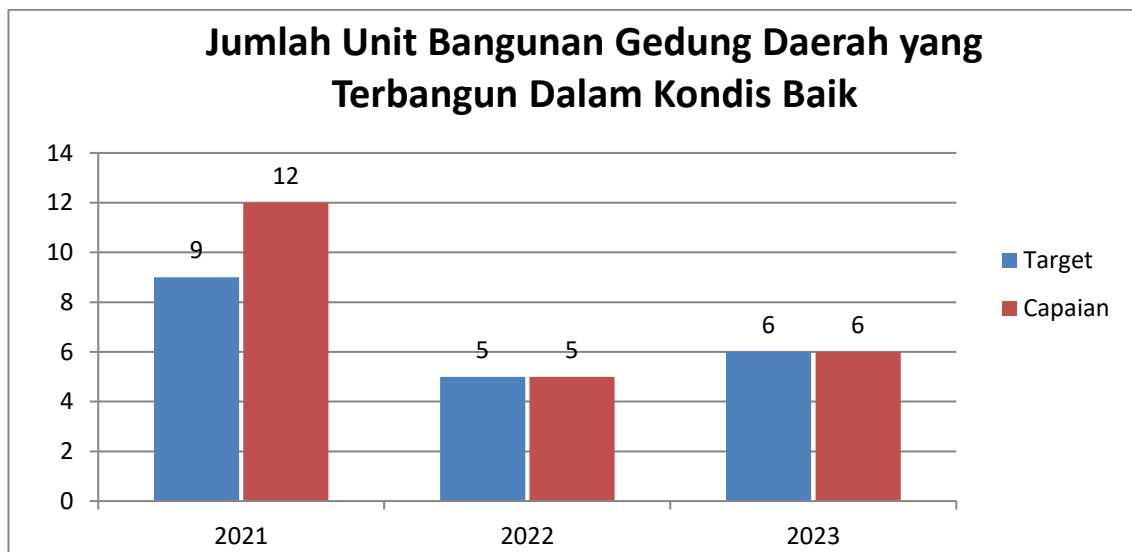


Tabel 30. Perbandingan Jumlah Unit Bangunan Gedung Daerah yang Terbangun Tahun 2021, 2022 dan 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah unit	9	12	5	5	6	6

Tabel diatas menunjukkan bahwa kegiatan Pembangunan Sarana Pemerintahan dan Prasana Umum dalam Kondisi Baik mencapai target.

Grafik 11. Perbandingan Jumlah Unit Bangunan Gedung Daerah yang Terbangun dalam Kondisi Baik Tahun 2020, 2021 dan 2022



6) Persentase Ketersediaan Sistem dan Prasarana Pengolahan Persampahan

a) Jumlah Unit TPS3R yang Terbangun

Ditahun 2023 ini Bidang Cipta Karya sebagai bidang yang bertanggung jawab dalam Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 222.846.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 207.292.500,- 19,40%. Persentase Kesediaan Prasarana Persampahan yang ditargetkan di tahun 2023 73,04% terealisasi hanya 19,40%. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di tahun anggaran 2023 ini yaitu :

Tabel 31. Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Pembayaran Hutang Belanja DED TPA Baru	1 Paket	Rp207.292.500	DAU

Tabel 32. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciaptakaryaan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Analisa Capaian Indikator Kinerja	Penjelasan Gagal/ Berhasil
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase - Persentase drainase kawasan perkotaan dalam kondisi baik Kegiatan	75%	56,25%	75%	Realisasi Indikator Program (56,25%) lebih kecil dari target (75%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (75%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Berhasil".

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - Persentase Drainase Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik	75%	52,25%	75%	Realisasi Indikator kegiatan (52,255) lebih besar dari target (52,25). Analisa Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target sebesar (75%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “ Berhasil”.
Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan - Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	500 meter	1562 meter	312,4%	Realisasi Indikator sub kegiatan (1562 meter) lebih besar dari target (500 meter). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (312,4%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”.
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase - Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	6000 meter	6000 meter	100%	Realisasi Indikator Program (6000m) sesuai dengan Target (6000 m). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Berhasil”.
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya - Persentase Jalan Lingkungan Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik	90,50%	54%	59,66%	Realisasi Indikator Program (54%) lebih kecil dari target (90,50%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (59,66%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “tidak Berhasil”. Disebabkan kekurangan anggaran
Kegiatan	90,50%	54%		

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - Panjang jalan lingkungan kawasan perkotaan yang ditingkatkan			59,66%	Realisasi Indikator Program (54%) lebih kecil dari target (90,50%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (59,66%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “tidak Berhasil”. Disebabkan kekurangan anggaran
Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan - Jumlah penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3	3	100%	Realisasi Indikator sub kegiatan (3 kawasan) sesuai dengan target (3 kawasan). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Berhasil”.
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Persentase Pelayanan Akses Air Minum	88,37%	89,02%	100%	Realisasi Indikator Program (89,02%) lebih besar dari target (89,02%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%) Indikator Kinerja masuk pada kategori “Berhasil”.
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - Persentase Pelayanan Akses Air Minum	88,37%	89,02%	100%	Realisasi Indikator Program (89,02%) lebih besar dari target (89,02%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%)

<p>Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat 	<p>1940S R</p>	<p>1730SR</p>	<p>33,56%</p>	<p>Indikator Kinerja masuk pada kategori “Berhasil”.</p> <p>Realisasi Indikator sub kegiatan (1730SR) lebih kecil dari target (1940SR). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (33,56%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Tidak Berhasil”.</p>
<p>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Akses Sanitasi Layak 	<p>100%</p>	<p>96,01%</p>	<p>96,01%</p>	<p>Realisasi Indikator Program (96,01%) lebih kecil dari target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (96,01%) Indikator Kinerja masuk pada kategori “Tidak Berhasil”. Dana yang disediakan tidak cukup untuk mencapai target.</p>
<p>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Akses Sanitasi Layak 	<p>100%</p>	<p>96,01%</p>	<p>96,01%</p>	<p>Realisasi Indikator Program (96,01%) lebih kecil dari target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (96,01%) Indikator Kinerja masuk pada kategori “Tidak Berhasil”.</p>
<p>Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman</p>	<p>500RT</p>	<p>848RT</p>	<p>16,96%</p>	<p>Target Realisasi Indikator sub kegiatan (848 RT) lebih besar dari target (848RT). Analisa Capaian</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota 				<p>Indikator Kinerja sebesar (16,96%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Tidak Berhasil”. Dana yang disediakan tidak cukup untuk mencapai target.</p>
<p>Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik 	500 RT	848RT	16,96%	<p>Target Realisasi Indikator sub kegiatan (848 RT) lebih besar dari target (848RT). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (16,96%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Tidak Berhasil”. Dana yang disediakan tidak cukup untuk mencapai target.</p>
<p>Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara 	3 unit	1 unit	33,33%	<p>Realisasi Indikator Kegiatan (1 unit) lebih kecil dari Target (3 Unit) . Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (33,33%). masuk pada kategori “Tidak Berhasil”.</p>
<p>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penanganan Sampah 	73,04	71,79%	98,28%	<p>Realisasi Indikator sub kegiatan (71,79%) lebih kecil dari target (73,04). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (98,28%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Tidak Berhasil”.</p>
<p>Kegiatan</p>				

<p>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penanganan Sampah 	73,04	71,79%	98,28%	<p>Realisasi Indikator sub kegiatan (71,79%) lebih kecil dari target (73,04). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (98,28%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Tidak Berhasil”.</p>
<p>Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 	300 RT	0	0	<p>Tidak adanya Pembangunan pada Kegiatan Tersebut</p>
<p>Program Penataan Bangunan Gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase prasarana pemerintahan dan sarana umum dalam kondisi baik 	90%	17,39%	19,32%	<p>Realisasi Indikator Kegiatan (17,39 %) lebih kecil dari target (90 %). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (19,32%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “tidak Berhasil”.</p>
<p>Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum dalam Kondisi Baik 	90%	17,39%	19,32%	<p>Realisasi Indikator Kegiatan (17,39 %) lebih kecil dari target (90 %). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (19,32%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “tidak Berhasil”.</p>

<p>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan 	1 Dok	1 Dok	100%	<p>Realisasi Indikator Kegiatan (1 Dok) sama dengan target (1 Dok). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Berhasil”.</p>
<p>Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah kab/kota yang dilakukan Rehabilitasi, renovasi, ubah suai 	6 Unit	6 Unit	100%	<p>Realisasi Indikator Kegiatan (1 Dok) sama dengan target (1 Dok). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Berhasil”.</p>

d. MENINGKATNYA KUALITAS JASA KONSTRUKSI

Pengukuran indikator Indeks kepuasan layanan jasa konstruksi dari sasaran Meningkatnya kualitas jasa konstruksii ini diukur dengan memberikan nilai pada masing-masing jenis informasi yang diberikan. Target **Baik** untuk Program Pembinaan Jasa Konstruksi dengan pagu anggaran Rp.406.922.200,.dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 396.722.200,- 97,49%. Program ini melaksanakan 3 kegiatan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

- 2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- Permasalahan
- Kurangnya SDM tentang pemahaman teknis Bina Konstruksi.
 - Kurangnya pemahaman penyedia jasa konstruksi terkait teknis bina konstruksi
 - Minimnya anggaran yang tersedia dalam pembelian alat laboratorium konstruksi.
- Solusi
- Melakukan pelatihan penguatan kapasitas SDM terkait teknis bina konstruksi
 - Perlu bimbingan dan pelatihan bagi penyedia jasa konstruksi menyangkut masalah teknis dan manajemen pelaksanaan pekerjaan, agar tercipta pemahaman yang sama antar unsur proyek (pengguna jasa, penyedia jasa dan masyarakat/ stakeholder yang ada).
 - Tersedianya anggaran pengadaan alat laboratorium konstruksi

e. MENINGKATNYA KUALITAS PEMANFAATAN RUANG

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ini mempunyai tujuan mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik, kongkrit sesuai dengan tata ruang dengan target Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukannya sebesar 100% dengan pagu anggaran Rp 534.316.500. ,. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 490.932.300,- 91,88%. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang melaksanakan 3 kegiatan yaitu:

- 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

3) Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

➤ Permasalahan

- Kurangnya SDM tentang Pemahaman Penyusunan Perencana mengenai Penataan Ruang.
- Minimnya anggaran yang tersedia dalam penyusunan pedoman RDTR.

➤ Solusi

- Melakukan pelatihan penguatan kapasitas SDM terkait penataan ruang
- Penyediaan anggaran karena dalam penyusunan dokumen RDTR membutuhkan anggaran yang besar.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tahun 2023 mengelola anggaran sebesar Rp. **137.915.469.404,-** dan terealisasi sebesar Rp. **110.648.410.178,-** Atau sebesar **80,23%**. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang realisasi anggarannya tidak mencapai 100% di sebabkan ada beberapa kegiatan fisik mengalami **Retensi** anggaran.

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan
Untuk mencapai sasaran tersebut maka Program kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Tabel 33. Program Penyelenggaraan Jalan

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI ANGGARAN					
		APBD KAB	DAK	JUMLAH	FISIK (%)	Rp.	%
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / kota		30.236.246.161	34.631.350.000	64.867.596.161		45.433.754.666	70,04
	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	61.678.216.961	34.631.350.000	27.046.866.961	59,95	42.959.627.875	69,65

*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Polewali Mandar*

	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	3,189.379.200	-	3,189.379.200	59,46	2.476.126,791	77,58
--	--	---------------	---	---------------	-------	---------------	-------

Berdasarkan tabel diatas Program Penyelenggaraan Jalan dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan terdapat 2 (Dua) indikator yaitu Persentase jalan kabupaten dalam kondisi Mantap (Sedang), (Baik) dan Persentase jembatan dalam kondisi baik. Menggunakan anggaran APBD Kabupaten dan APBN Rp. 64.867.596.161, realisasi keuangan RP. 45.433.754.666,- atau 70,04%.- Kurangnya realisasi anggaran di sebabkan adanya retensi anggaran.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air

Untuk mencapai sasaran tersebut maka Program kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Tabel 34. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI ANGGARAN					
		APBD KAB	DAK	JUMLAH	FISIK (%)	Rp.	%
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang sungai yang terpelihara	2.061.779.500	-	2.061.779.500		1.213.838.150	58,87%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1).Persentase Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik; 2).Persentase Bendung Dalam Kondisi Baik 3).Persentase Pintu Air Irigasi Dalam Kondisi Baik	3.028.517.380	3.542.949.000	6.571.466.380		5.852.858.053	89,06%

Berdasarkan tabel diatas Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terdiri dari Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan dana APBD Kab sebesar Rp. 2.061.779.500 dengan realisasi keuangan Rp. 1.213.838.150,- 58,87%. Kurangnya realisasi anggaran di sebabkan adanya retensi anggaran.

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan dana APBD Kab. Dan APBN sebesar Rp. 6.571.466.380,- dengan realisasi keuangan Rp. 5.852.858.053,- 89,06% Kurangnya realisasi anggaran di sebabkan adanya retensi anggaran.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman
Untuk mencapai sasaran tersebut maka Program /kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Tabel 35. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI ANGGARAN					
		APBD KAB	DAK	JUMLAH	FISIK (%)	Rp.	%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung	Persentase Drainase Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik	2.364.061.750	-	2.364.061.750		1.990.592.497	84,20

Berdasarkan tabel diatas Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota menggunakan anggaran APBD Kab Rp. 2.364.061.750,realisasi keuangan 1.990.592.497,- 84,20%. Kurangnya realisasi anggaran di sebabkan adanya retensi anggaran

Tabel 36. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI ANGGARAN					
		APBD KAB	DAK	JUMLAH	FISIK (%)	Rp.	%
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.139.657.200	-	1.139.657.200		890.269.900	78,12 %

Berdasarkan tabel diatas Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya terdiri dari kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran APBD Kab. sebesar Rp. 1.139.657.200,- realisasi keuangan Rp 890.269.900,00,- 78,12%.

Tabel 37. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI ANGGARAN					
		APBD KAB	DAK	JUMLAH	FISIK (%)	Rp.	%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	6.196.601.280	10.326.616.998	16.523.218.278		14.179.191.149	85,81 %

Berdasarkan tabel diatas Program Penataan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran APBN sebesar Rp 10.326.616.998,- dan anggaran APBD Kab. sebesar Rp. 6.196.601.280,-. Total

anggaran Rp.,16.523.218.278- dengan realisasi keuangan Rp. 14.179.191.149
,- 85,81%.

Tabel 38. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI ANGGARAN					
		APBD KAB	DAK	JUMLAH	FISIK (%)	Rp.	%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Akses Sanitasi Layak	4.331.602.900	6.193.068.000	10.524.670.900		10.377.764.450	98,60 %

Berdasarkan tabel diatas program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran APBN sebesar Rp 6.193.068.000 dan anggaran APBD Kab. sebesar Rp.4.331.602.900,. Total anggaran Rp. 10.524.670.900,- dengan realisasi keuangan Rp. 10.377.764.450,- Persentase 98,60%.

Tabel 39. Program Penataan Bangunan Gedung

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI ANGGARAN					
		APBD KAB	DAK	JUMLAH	FISIK (%)	Rp.	%
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum dalam Kondisi Baik	23.552.575.288	-	23.552.575.288		20.530.773.655	87,17 %

Berdasarkan tabel diatas Program Penataan Bangunan Gedung dengan menggunakan anggaran APBD sebesar Rp 23.552.575.288,- dengan realisasi

keuangan Rp. 20.530.773.655,- dengan persentase 87,17%. Tidak tercapainya realisasi anggaran 100% karena adanya retensi anggaran.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi

Untuk mencapai sasaran tersebut maka Program/kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Tabel 40. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI ANGGARAN					
		APBD KAB	DAK	JUMLAH	FISIK (%)	Rp.	%
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Indeks Kepuasan pelayanan Jasa konstruksi	130.599.800	-	130.599.800		130.599.800	100%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan pelayanan Jasa konstruksi	134.689.900	-	134.689.900		124.489.900	92,43 %
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Indeks Kepuasan pelayanan Jasa konstruks	141.632.500	-	141.632.500		141.632.500	100%

Berdasarkan tabel diatas Program Pembinaan Jasa Konstruksi terdiri dari kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan menggunakan anggaran APBD Kab. sebesar Rp. 130.599.800,- dengan realisasi keuangan sebesar 100%. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran APBD Kab. Sebesar Rp 134.689.900.- realisasi keuangan 124.489.900 92,43%. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan Menggunakan anggaran APBD Kab. sebesar Rp 141.632.500,- dengan realisasi keuangan sebesar 100%.

Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang

Untuk mencapai sasaran tersebut maka Program/kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Tabel 41. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI ANGGARAN					
		APBD KAB	DAK	JUMLAH	FISIK (%)	Rp.	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan RDTR	195.420.300	-	195.420.300		193.441.100	98,99 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	338.896.200	-	338.896.200		297.491.200	87,78 %

Berdasarkan tabel diatas Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri dari kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran APBD Kab. sebesar Rp. 195.420.300,- dengan realisasi keuangan sebesar 193,441.100, 98,99%.. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota anggaran APBD Kab. Sebesar Rp 338.896.200,- ,realisasi keuangan Rp. 297.491.200,- atau 87,78%,. Pada kegiatan ini anggarannya tidak terealisasi 100% disebabkan adanya Revisi RTRW yang belum rampung karena kegiatan itu menjadi acuan penggunaan anggaran sehingga anggaran yang tersedia tidak teralisasi sepenuhnya.

Sasaran 6 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut maka Program/kegiatan yang dilaksanakan yatu :

Tabel 42. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI ANGGARAN					
		APBD KAB	DAK	JUMLAH	FISIK (%)	Rp.	%

*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Polewali Mandar*

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	87.459.700	-	87.459.700	100%	87.125.228	99,62%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu	7.923.712.530	-	7.923.712.530		7.921.478.501	99,97%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tertib Ketatausahaan Kantor	349.101.300	-	349.101.300		340.787.541	97,62%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Tertib Ketatausahaan Kantor	74.591.000	-	74.591.000		74.591.000	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tertib Ketatausahaan Kantor	320.038.217		320.038.217		275.641.388	86,13%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tertib Ketatausahaan Kantor	391.456.500		391.456.500		384.797.000	98,30%

Berdasarkan tabel 3.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan menggunakan anggaran APBD Kab. sebesar Rp. **9.146.359.247,-** dengan realisasi keuangan **9.084.420.658** atau sebesar 99,32%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023 disusun untuk memaparkan pencapaian Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja yang telah dicapai dalam tahun anggaran 2023. Pemaparan capaian kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar terhadap publik. Laporan ini diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja dan penyempurnaan strategi pencapaian sasaran kinerja.

Ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi dalam hal penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ini yaitu :

1. Gambaran umum tentang pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2023 dapat dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, beberapa kegiatan tidak mencapai target bahkan ada yang melampaui dari target.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Sebagian besar masalah utamanya masih membutuhkan tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Solusi, agar kedepannya lebih berhati-hati dalam menentukan proyeksi target agar dapat memenuhi pencapaian sasaran yang telah ditentukan berdasarkan anggaran yang disediakan.
3. Realisasi anggaran masih mengalami keterlambatan, hal ini terutama disebabkan oleh proses perencanaan dilaksanakan pada tahun yang bersamaan sehingga pelelangan terlambat dilaksanakan akhirnya tidak menyediakan tenggang waktu pelaksanaan yang cukup dan jangka waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan, akan mengakibatkan setidaknya dana sebesar 5% dari nilai proyek mengalami retensi, hal ini mempengaruhi beban pendanaan pada tahun berikutnya belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
4. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga

pelaporan dilingkup interen maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk meminimalisir terjadinya kesalahan sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023 ini disampaikan untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan selanjutnya. Dengan keterbatasan tenaga dan waktu yang ada pada kami, kritik dan saran kami harapkan dari pihak lain guna menyempurnakan laporan ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita bimbingan, Rahmat, dan Karunia-Nya kepada kita semua dalam rangka melaksanakan tugas di masa mendatang.

Polewali, Maret 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Ir. HUSAIN ISMAIL, ST.,M.AP

Pangkat : Pembina

NIP : 19720809 200502 1 003